

**PENELITIAN KARAKTERISTIK
HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT
ATAS TANAH DI PAPUA
DALAM RANGKA
TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN DI PAPUA**



**DITERBITKAN OLEH:
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
2013**

LAPORAN AKHIR
Penelitian Karakteristik Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
di Papua dalam Rangka Tertib
Administrasi Pertanahan di Papua



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2019

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	vii
Abstrak	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Isi	xviii

iii
vii
xi
xiv
xvi
xviii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
3. Ruang Lingkup	6
4. Metoda Penelitian	7
5. Sistematika Penulisan Penelitian	9

BAB II Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Di Papua Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional Dan Undang Undang Otonomi Provinsi Papua

A. Pengertian Hukum Adat	11
B. Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan	13
Undang Undang Dasar 1945	13
Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria	14
C. Hak Ulayat Papua Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional	17
D. Perlindungan Hak Ulayat	23
1. Indonesia Negara Hukum dan Kesejahteraan	24
2. Hak menguasai Negara atas tanah (HMN)	25
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Hak Ulayat	28
4. Daerah Kabupaten/Kota Berwenang Melindungi Masyarakat Hukum Adat	30
E. Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Penataan Ruang Wilayah	31

xviii



BAB III

Perkembangan Sejarah, Sosial Budaya, Politik Pemerintahan Dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Di Papua

A. Sosiologi Kebudayaan dalam Masyarakat	10
B. Unsur-Unsur Kebudayaan	12
1. Bahasa	12
2. Sistem Pengetahuan	13
3. Organisasi Sosial	13
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi	14
a. Sistem Mata Pencarian Hidup	14
b. Sistem Religi	16
c. Kesenian	17
C. Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat	17
1. Teori Tentang Evolusi Keluarga Manusia	19
2. Tahap-tahap pembentukan keluarga	19
3. Bentuk Kehidupan Keluarga	19
4. Kelompok Kekerabatan	20
5. Kelompok kekerabatan menurut fungsi	21
a. Keturunan Patrilineal	21
b. Keturunan Matrilineal	22
c. Keturunan Bilateral/ambilineal	22
d. Keturunan Parental /Altenereend	23
D. Fungsi Perkawinan	24
E. Pembatasan Jodoh Dalam Perkawinan	25
F. Refleksi Antropologi Masyarakat Hukum Adat Papua	26
G. Sosial dan Budaya Masyarakat Papua	31
H. Sejarah Demografi Penduduk di Papua	33
I. Pola Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat	34
1. Kepemimpinan Ondoafi, ondofofo, dan kepala suku	34
a. Struktur Kepemimpinan Klen Kecil (Marga)	35
b. Struktur Kepemimpinan Tingkat Kampung	36
c. Struktur Kepemimpinan Tingkat Konfederasi	41
2. Kepemimpinan Kerajaan	44
a. Sistem Kerajaan Tradisional	45
b. Kerajaan di Kepulauan Raja Ampat	47
c. Batas-Batas Kekuasaan Kerajaan-Kerajaan	48
1) Kerajaan Salawati (Samate)	48
2) Kerajaan Sailolof	49



3) Kerajaan Misol	50
4) Kerajaan Waigeo	51
d. Organisasi Pemerintahan Tradisional	51
e. Struktur Organisasi Pusat	57
f. Atribut Kepemimpinan	58
3. Kepemimpinan Pria Berwibawa (Big Man)	58
a. Ciri-ciri Pria Berwibawa	61
b. Tipe-tipe Pemimpin Pria Berwibawa	63
1) Pemimpin Berdasarkan Kemampuan Berwiraswasta	63
2) Pemimpin Berdasarkan Kemampuan Memimpin Perang	64
c. Kepemimpinan Campuran	65
1) Kepemimpinan Campuran di Biak-Numfor	74
2) Kepemimpinan Campuran di Waropen	77
3) Struktur Sosial	79
4) Sistem Pemerintahan	

BAB IV Hasil Pengumpulan Dan Pengolahan Data

A. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	108
1. Distrik Muara Tami Kota Jayapura	110
2. Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura	117
3. Distrik Sentani Timur	120
B. Kabupaten Mimika	126
1. Zona Sampel Penelitian di Kabupaten Mimika	126
2. Letak Geografis Kabupaten Mimika	129
3. Fisiografis Kabupaten Mimika	129
a. Bentangan Alam	131
b. Topografi	131
c. Jenis Batuan	132
d. Bahan Galian	134
e. Kawasan Hutan dan Taman Nasional Lorent	135
f. Penggunaan Tanah	138
g. Uraian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten	138
h. Karakteristik Sosial	140
4. Masyarakat Hukum Adat Suku Kamoro	147
5. Masyarakat Hukum Adat Suku Amungme	148
6. Masyarakat Akan Hukum (Adat Istiadat)	149



C. Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat	157
1. Letak Geografi Wilayah	157
2. Kondisi Fisik Wilayah	157
3. Penggunaan Tanah	158
4. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya	158
5. Gambaran Umum Penguasaan Tanah	158
6. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong	160
7. Struktur Kepemimpinan Adat Suku Mool	162
8. Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Hak Ulayat Suku Mool di Kabupaten Sorong	163
9. Peradilan Adat Suku Mool	164
D. Distrik Salawati Kabupaten Sorong	166
1. Karakteristik Sosial Distrik Salawati Kabupaten Sorong	166
2. Suku Mool Sigin	166
a. Struktur Kepemimpinan	166
b. Sistem pewarisan	167
c. Peralihan Hak	167
E. Kota Sorong	168
1. Masyarakat Hukum Adat di Kota Sorong	168
2. Konflik dan Sengketa Hak Ulayat di Kota Sorong	170
F. Kabupaten Manokwari	171
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Manokwari	171
2. Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak	171
3. Kepemimpinan Masyarakat Adat Suku Arfak	172
4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak	175
5. Kondisi Fisik Wilayah	177
6. Penggunaan Tanah	177
7. Gambaran Sosial Ekonomi Wilayah	179
G. Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan	180
H. Pulau Mansinam Distrik Manokwari Timur	181
1. Kependudukan	182
2. Penggunaan Tanah	182
3. Sistem Pewarisan	183
4. Struktur Kepemimpinan	184
5. Peralihan Hak Ulayat	184
6. Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	184



I. Kampung Anjai, Distrik Kebar Kabupaten Tambraw	185
1. Gambaran Umum Wilayah	185
2. Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Arfak Meyah	185

BAB V

Analisis dan Pembahasan

A. Karakteristik Obyek Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	187
1. Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	187
2. Kabupaten Mimika	188
3. Kabupaten Manokwari	189
4. Kabupaten Sorong dan Kota Sorong	192
B. Karakteristik Subyek Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	193
1. Kabupaten Jayapura	193
2. Kota Jayapura	194
3. Kabupaten Mimika	194
4. Kabupaten Manokwari	195
5. Kabupaten Sorong	197
6. Kota Sorong	198
C. Karakteristik Tatahan Hukum Hak Ulayat	200
D. Perumusan Karakteristik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua	202
E. Pemetaan Tematik Fisik Wilayah Hak Ulayat Atas Tanah 204	204
A. Land record (rekaman obyek dan subyek)	204
B. Land cart (Peta Tanah)	204
C. Land right (Tingkatan Hak)	205
D. Land mark (tanda bukti hak)	208
F. Pengembangan Pengelolaan Hak Ulayat Atas Tanah	211
G. Sistem Pemetaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat	211
H. Penyeragaman Pemetaan Tematik Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan	212



BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan	218
B. Rekomendasi	220

Daftar Pustaka	263
----------------	-----

Lampiran	268
----------	-----

Lampiran 1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	269
Lampiran 2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	308
Lampiran 3.	Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	316
Lampiran 4.	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah	319





Penanggung Jawab
Ir. Iwan Taruna Isa, MURP.

Ketua
Prof. DR. Budi Mulyanto, M.Sc.



Sekretaris
Ir. Sriyatno, MM



Peneliti Madya
Trië Sakti, SH, CN, MH.



Pembantu Peneliti
DR. Aslan Noor, SH, MH, SP1.



Munsyarief, A. Ptnh., M.Si.

